

# **STRATEGI UNTUK MENCAPAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI YANG LESTARI DALAM MENUJU ERA EKOLABEL**

**Oleh :  
Alastair I Fraser**

*Koordinator Program  
Program Pengelolaan Hutan Tropis Indonesia  
Kerjasama Departemen Kehutanan dengan ODA (Inggris)*

## **Pendahuluan**

Dengan adanya kesadaran yang semakin meningkat mengenai apa yang sedang terjadi di seluruh dunia melalui perantara media komunikasi massa dan adanya peningkatan standard pendidikan, konsumen menjadi semakin sensitif dalam mengaitkan antara produk (barang) dan lingkungan. Konsumen semakin dapat mendiskriminasikan terhadap suatu produk yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dalam berbagai bentuk dalam kaitannya dengan proses produksinya.

Di samping itu terdapat juga pertumbuhan kesadaran baik secara umum (masyarakat) maupun secara politik mengenai pentingnya hutan dalam melindungi lingkungan, dan sebagai habitat utama bagi biodiversitas yang besar untuk tumbuhan dan binatang. Beberapa diantaranya mempunyai manfaat langsung bagi kesejahteraan manusia, sementara lainnya mempunyai fungsi yang penting dalam jaringan kehidupan dalam hubungannya dengan kelangsungan kehidupan di dalam dan di luar hutan.

Pada waktu konsumen berkeinginan untuk membeli produk yang dibuat dari kayu, mereka tidak hanya mempertimbangkan mengenai kelangsungan penyediaan kayu, tetapi juga kelestarian hutan sebagai habitat, sebagai pelindung tanah, sebagai pengubah fungsi-fungsi hidrologis dan sebagai arus atau sumber potensial bagi hasil hutan selain kayu yang berguna secara luas.

Ekolabel akan sudah merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk hutan yang mereka beli dibuat sedemikian rupa sehingga semua fungsi hutan telah terjaga secara lestari. Oleh sebab itu berbagai strategi bagi pengelolaan hutan yang lestari harus memperhatikan kelestarian hutan sebagai ekosistem dalam jangka panjang.

Di Indonesia secara umum terdapat berbagai tipe hutan produksi, termasuk hutan hujan, hutan gambut, hutan payau dan hutan tanaman. Hutan tanaman secara umum adalah monokultur dan tidak mempunyai tingkatan

biodiversitas yang sama sebagaimana dengan hutan alam. Disebabkan karena pada umumnya mempunyai produktifitas yang tinggi, areal hutan tanaman nampaknya hanya akan menyisihkan relatif kecil areal sebagai hutan alam untuk waktu yang akan datang.

Oleh sebab itu terdapat dua aspek kelestarian produk (keluaran) sektor kehutanan yang harus dipertimbangkan. Pertama, berkaitan dengan tipe hutan yang akan diperlukan untuk menjamin tersedianya bahan baku kayu pada berbagai tipe yang berbeda untuk memenuhi pertumbuhan permintaan pada pasar nasional dan internasional. Kedua, berkaitan dengan pengelolaan tiap-tiap tipe hutan yang dengan demikian hutan itu dapat terus terjaga dan bahkan meningkat bahan baku yang dihasilkannya tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Hutan tanaman dan hutan alam masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, untuk itu perlu dicapai keseimbangan diantara kedua kategori besar tersebut dalam memaksimalkan kelebihan secara keseluruhan dan meminimalkan kekurangannya.

Hutan tanaman secara umum mempunyai produktifitas yang tinggi, dan akan menghasilkan bahan baku yang seragam bagi industri, serta dapat ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dengan kelerengan ringan, akan tetapi pembangunan hutan tanaman memerlukan investasi yang besar, mempunyai biodiversitas yang terbatas, dan menghasilkan tipe-tipe kayu yang sangat terbatas. Terlebih lagi dengan adanya perhatian untuk suatu jenis tertentu, sehingga selanjutnya produk yang dapat dihasilkan akan semakin terbatas. Meskipun demikian hutan tanaman secara ideal dapat memenuhi permintaan produk dengan volume yang besar seperti untuk industri kertas dan kayu serpih (chip) atau untuk produk papan serat.

Di sisi lain, pada hutan alam akan tetap terdapat banyak jenis yang akan memenuhi permintaan produk-produk kayu secara khusus demikian juga untuk produk bukan kayu. Hutan alam memerlukan relatif sangat sedikit investasi untuk pemeliharaan, mempunyai biodiversitas yang tinggi dan berpotensi tinggi untuk menghasilkan produk-produk baru di waktu yang akan datang dalam menanggapi perubahan permintaan pasar. Meskipun demikian produktifitas beberapa jenis secara umum rendah, pada umumnya sukar dikelola dan umumnya rendah tingkat keterjangkauannya serta terletak pada lokasi yang lebih sulit.

Pada hutan tanaman penitikberatkan pengelolaan hutan harus pada kelestarian produktifitas dengan memperhatikan secara khusus pada lokasi yang subur, akan tetapi dalam pengelolaannya sebaiknya juga memperhatikan semaksimal mungkin pada biodiversitas hutan, serta pengaturan manfaat lain seperti untuk perlindungan tanah, rekreasi dan pembentukan bentang alam (lansekap).

Pada hutan alam, pengelolaan sebaiknya memperhatikan pada upaya pencapaian keseimbangan optimal antara semua fungsi hutan, dengan demikian

diversitas hutan akan tetap terjaga, dan selanjutnya kemampuan hutan akan tetap terpelihara untuk mendukung sebanyak mungkin jenis-jenis tumbuhan sehingga tetap menghasilkan produk-produk yang bermanfaat.

Semua hutan akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di dalam dan di sekitarnya. Hutan tanaman akan lebih banyak menyediakan kesempatan kerja, dan mungkin juga akan menghasilkan produk-produk yang berguna bagi masyarakat setempat. Demikian juga pada hutan alam menyediakan bermacam-macam produk yang berguna bagi masyarakat setempat yang mempunyai nilai-nilai tradisional, selain itu hutan juga telah berfungsi sebagai penyedia air bagi lahan pertanian.

Pada saat populasi penduduk masih kecil dan areal hutan masih luas, maka tidak terdapat konflik antara kelestarian produk yang diperlukan masyarakat dari hutan dan pembukaan hutan bagi keperluan usaha pertanian, khususnya apabila hutan tersebut setelah ditinggalkan mampu untuk pulih sebagaimana keadaan semula. Meskipun demikian diperlukan adanya keseimbangan antara keperluan hutan bagi lahan pertanian dimana produk hutan telah berganti sehubungan areal hutan telah berkurang dan semakin meningkatnya populasi masyarakat, untuk itu cara baru harus dicari untuk membantu masyarakat setempat, sehingga dengan demikian dapat dicapai keseimbangan di antara apa yang sekarang menimbulkan konflik kebutuhan.

### **Ecolabelling**

Sampai sekarang masih belum jelas bagaimana ekolabel akan diterapkan dalam praktek pengaturan produk hutan. Kesulitan utama adalah pada pengelolaan ekosistem yang kompleks sebagaimana hutan tropis yang mempunyai berbagai manfaat, yang senantiasa berarti harus dapat memutuskan untuk menetapkan manfaat mana yang harus diprioritaskan. Kerusakan yang terjadi pada hutan akan menimbulkan kerusakan alami tidak nampak, tetapi pengaturan pemungutan yang menimbulkan kerusakan alami tidak nampak mempunyai dampak yang dapat dideteksi dalam jangka pendek. Meskipun demikian pertimbangan ekonomi menyatakan bahwa pemungutan tersebut harus cukup menguntungkan.

Pada saat ini hanya terdapat sedikit data mengenai dampak intensitas penebangan pada biodiversitas atau pada kemampuan hutan untuk regenerasi sehingga dengan demikian komposisi dan struktur tetap terpelihara sebagaimana sebelum penebangan. Terdapat beberapa bukti dari hasil inventarisasi pada areal tebangan dewasa ini yang menyatakan bahwa terdapat total pertumbuhan yang diukur dari luas bidang dasar atau pemulihan volume setelah penebangan, demikian juga untuk komposisi jenisnya yang mungkin berbeda.

Terdapat beberapa kriteria yang sedang dikembangkan untuk penentuan pengelolaan yang lestari, tetapi hal itu akan memerlukan waktu yang cukup lama

setelah penebangan, sebelum ada kemungkinan untuk mengetahui apakah kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi. Hanya terdapat sedikit pemahaman mengenai dampak penebangan pada mikro-organisme tanah, iklim mikro dan jaringan yang kompleks mengenai keterkaitan dalam perlindungan hutan. Hal itu tidak memungkinkan untuk mengatakan apakah areal hutan tersebut sudah dikelola secara lestari dalam jangka panjang.

Selanjutnya pada jangka pendek, ecolabelling nampaknya harus difokuskan pada sistem yang harus diambil bagi pengelola hutan dan pemantauan situasi. Hal itu berarti bahwa permintaan untuk mempunyai produk yang berlabel yang datang dari hutan yang dikelola secara lestari akan berubah sepanjang waktu. Sebagaimana proses yang dapat dilihat pada polusi lingkungan dimana permintaan untuk terus meningkatkan perlakuan pengolahan limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan, demikian pula dapat lebih dipelajari mengenai kesalahan pengaruh yang mungkin terjadi.

Apabila pengelolaan yang lestari ditetapkan untuk memanfaatkan sebuah kawasan hutan sedemikian rupa sehingga kapasitas produksi dan perlindungan serta biodiversitasnya tidak berkurang sepanjang masa, untuk itu kejelasan mengenai keadaan awal harus dicatat serinci mungkin. Pengukuran kembali secara periodik selanjutnya akan diperlukan untuk memantau perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada tempat tersebut. Apabila perubahan dapat terdeteksi misalnya seperti pada adanya pengurangan dalam perbandingan suatu atau beberapa jenis tumbuhan, selanjutnya sebuah keputusan harus sudah dibuat untuk menetapkan apakah perubahan itu dapat diterima bagi pemberian ekolabel atau tidak.

Oleh sebab itu masih sulit untuk melihat bagaimana metode yang mampu untuk memenuhi permintaan ecolabelling dapat dikenalkan dalam waktu dekat ini. Mungkin perlu untuk melihat lebih jauh pada kondisi dasar areal hutan dan ukuran yang diterapkan untuk menjamin kelestarian dan penawaran sebuah label akan menunjukkan pengelolaan telah sesuai dengan **pelaksanaan terbaik** yang berlaku.

### **Pengelolaan Hutan**

Telah adanya acuan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa hutan lebih jauh bukan hanya sebagai sumber kayu, kayu lapis dan produk lain. Di Indonesia, areal yang luas telah diklasifikasikan sebagai hutan produksi, dan sistem HPH dewasa ini memberikan dasar bagi pemanfaatan hutan untuk menghasilkan kayu.

Meskipun demikian dalam era ecolabelling itu akan harus diakui bahwa setiap hutan produksi harus mampu secara terus menerus berfungsi lain sebagai perlindungan hutan dan memperbaiki iklim mikro. Hutan produksi juga sebagai sumber penting bagi hasil hutan bukan kayu dan tidak ada alasan mengapa

kegiatan ekonomi lain seperti pariwisata tidak perlu dipadukan dengan produksi kayu. Hal itu pada saat ini telah terdapat pada beberapa hutan di Jawa dan di beberapa negara lainnya.

Permasalahan pada saat ini adalah apakah HPH diijinkan hanya mengekstrasi kayu saja dan tidak memberikan beberapa hak untuk memungut produk-produk lain atau mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi lain seperti pariwisata dan rekreasi.

Sangat diharapkan bahwa pengelola hutan dapat mempunyai pandangan yang menyeluruh dan memaksimalkan semua potensi produktif dari hutan. Apabila pariwisata dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dipadukan dengan produksi kayu akan terdapat dorongan yang kuat bagi pengelola untuk memelihara biodiversitas hutan, dengan demikian produk-produk lain dapat tetap terjaga.

Strategi bagi pengelolaan hutan dalam era ecolabelling sebaiknya menitikberatkan pada berbagai fungsi hutan dan diperlukan pengelolaan sumberdaya hutan untuk mencapai kelestarian yang seimbang di antara semua fungsi-fungsi hutan.

Langkah penting pertama yang sudah diambil menurut petunjuk ini adalah memperkenalkan konsep KPHP (Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi) yang akan menggantikan sistem HPH saat ini apabila telah berakhir. Masih terdapat beberapa aspek sistem KPHP yang belum ditetapkan sepenuhnya, tetapi hal itu telah merupakan dasar bagi sistem pengelolaan hutan yang dapat memenuhi permintaan ecolabel.

KPHP ditentukan sebagai suatu kawasan hutan yang ditetapkan untuk tujuan pengelolaan. KPHP dapat berupa hutan alam, hutan tanaman atau kombinasi keduanya. Batas-batasnya sebaiknya menggunakan batas alam berbentuk DAS dan penampakan alami lainnya. Ukuran luasnya bergantung pada tipe dan keadaan hutan serta manfaat hutan.

Pada saat ini terdapat 2 pilot KPHP yang sedang dalam proses penetapannya di Kalteng dan Jambi dan 2 unit lain di Riau sedang direncanakan. Pada unit pilot, pada awalnya ditekankan pada ketentuan batas-batas permanen dimana masyarakat setempat ikut berpartisipasi, serta pada penerapan pengenalan inventarisasi secara lengkap bagi seluruh areal yang diprioritaskan untuk pembuatan rencana pengelolaan. Inventarisasi tersebut telah selesai dikerjakan dan menunjukkan bahwa areal bekas tebangan 10 - 15 tahun yang lalu secara umum telah terpulihkan dengan kecepatan pertumbuhan volume yang cukup untuk memenuhi penebangan periode kedua pada 30 - 40 tahun setelah penebangan yang pertama. Meskipun demikian studi mengenai komposisi jenis, ukuran kayu dan kualitas kayu belum selesai dikerjakan, sehingga masih terlalu awal untuk mengatakan apakah tingkat pemungutan saat ini dapat diteruskan.

### Pembangunan KPHP

Untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan bagi ecolabelling maka diperlukan beberapa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KPHP. Termasuk didalamnya keharusan adanya batas-batas dalam (internal) untuk membentuk blok-blok dan apabila memungkinkan batas itu dapat ditentukan menurut manfaat dari hutan. Selain itu pada areal yang lebih kecil yang memenuhi kriteria sebagai **hutan lindung** maka mungkin areal tersebut secara khusus dapat ditetapkan dengan baik untuk pengembangan rekreasi dan pariwisata.

Inventarisasi pilot KPHP telah pula meliputi pengumpulan informasi hasil hutan bukan kayu dan blok-blok sebaiknya juga diatur sedemikian rupa sehingga pemungutan produk-produk bukan kayu tersebut dapat dipadukan dengan pemungutan kayu.

Sistem HPH dewasa ini menetapkan jatah tebangan berdasarkan ketersediaan areal bagi pemungutan, dengan pertimbangan daur tebangan selama 35 tahun, dan kenyataannya volume jenis-jenis komersial yang ditebang lebih besar dibanding batas diameter tebangan sebagaimana yang diukur oleh tenaga cruising sebelum penebangan.

Inventarisasi pilot KPHP menyimpulkan bahwa hutan akan pulih kembali setelah penebangan sebagaimana keadaan awal pada berbagai tingkat, dengan demikian pada beberapa areal mungkin siap dipungut dalam periode 35 tahun, sementara areal lain memerlukan waktu yang lebih panjang. Untuk itu diharapkan agar tiap-tiap blok diamati satu persatu untuk menentukan kapan blok tersebut siap untuk dipungut pada periode keduanya. Sebuah rencana pengelolaan akan mengatur program pemungutan yang lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi hutan.

Tiap-tiap blok sebaiknya juga disurvei hasil hutan bukan kayunya, sehingga rencana pemungutannya yang sesuai dengan siklus pemungutan untuk produk tersebut dapat disiapkan. Idealnya masyarakat setempat sebaiknya dilibatkan dalam pemungutan produk-produk bukan kayu tersebut.

Suatu unsur penting bagi pengelolaan hutan adalah kemudahan (akses) untuk pengawasan, pemeliharaan dan perlindungan, dan sebuah jaringan jalan dapat juga mempunyai peranan yang penting bagi pengembangan masyarakat setempat apabila direncanakan sesuai keperluan mereka.

Peta yang akurat dan informatif juga merupakan syarat dasar bagi pengelolaan hutan, dan hal itu seharusnya dipadukan dengan catatan (register) blok atau data dasar yang mencatatkan perincian menyeluruh mengenai hutan dan semua kegiatan yang pernah dilakukan pada hutan dan blok tersebut. Ketersediaan komputer yang didasari Sistem Informasi Geografis memungkinkan semua data dapat dengan mudah disimpan dan diambil untuk tujuan-tujuan perencanaan pengelolaan.

Catatan mengenai blok akan menunjukkan keadaan hutan yang akan memungkinkan sebuah percobaan dibuat apabila diperlukan adanya masukan-masukan seperti penanaman pengkayaan. Catatan sebaiknya memuat biaya yang sebenarnya pada semua perlakuan silvikultur sehingga dengan demikian keputusan dapat dibuat kapan saja dan dimana saja berdasarkan pertimbangan ekonomi untuk investasi yang berhubungan dengan perlakuan yang akan diterapkan dan ini berkaitan dengan pendapatan akhir yang dapat diharapkan.

Jika pendekatan KPHP dikembangkan dengan masukan dasar yang logis dan sistem pengelolaan yang transparan yang memasukan unsur-unsur tersebut di atas, maka hal itu akan memenuhi persyaratan bagi ecolabelling, dan dapat untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan kita.

Hasil yang lebih penting akan berupa bahwa industri pengolahan kayu saat ini akan mempunyai gambaran yang jelas mengenai prospek masa depannya dan selanjutnya pengelola industri kehutanan akan menanamkan modalnya dengan percaya, sementara nantinya Indonesia dapat tetap menikmati manfaat ekonomi dari hutannya pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 100 dan 150.